

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan struktural yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui kenaikan penghasilan, perluasan peluang kerja, dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar menekankan peningkatan *output* tetapi juga distribusi manfaat secara merata agar tercipta pembangunan yang inklusif (Titalessy *et al.*, 2024).

Menurut Awalia *et al.* (2024) menunjukkan bahwa banyak provinsi di Indonesia masih mengalami ketimpangan pembangunan regional karena distribusi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, sehingga memperbesar kesenjangan pendapatan dan kualitas pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, ketimpangan struktural ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Fenomena ini secara makro mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali terjebak dalam pola yang eksklusif di mana akumulasi modal cenderung hanya terjadi di wilayah-wilayah yang maju dan mapan. Ketidaktercapaian konvergensi ekonomi mencerminkan adanya hambatan struktural dalam mobilitas faktor produksi yang hanya dapat diatasi melalui penguatan konektivitas dan kualitas modal manusia (Zhang *et al.*, 2023). Jika investasi tidak dialihkan secara efisien ke wilayah-wilayah pinggiran, kenaikan PDRB nasional berisiko hanya menjadi angka yang tidak mampu mengurangi ketimpangan ekonomi secara mendasar.

Pergeseran pola dalam teori pembangunan ekonomi modern menegaskan bahwa peningkatan *output* agregat (PDRB) tidak lagi dapat dijadikan instrumen tunggal untuk mengukur keberhasilan suatu wilayah. Sebagaimana dijelaskan oleh ekonom seperti Todaro & Smith (2020) dan Sen (1999), pembangunan sejati menuntut terjadinya transformasi struktural yang tidak hanya bertumpu pada akumulasi kapital melalui investasi, tetapi juga pada perluasan kapabilitas dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas modal manusia (IPM) dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Dengan kata lain, tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna secara substansial jika tidak dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan spasial. Landasan teoretis inilah yang memunculkan urgensi analitis untuk selalu mengkritisi apakah sebuah ekspansi ekonomi merupakan wujud nyata dari kemajuan struktural, atau sekadar pertumbuhan semu (*growth without development*) yang tidak menyentuh sektor riil masyarakat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi bukan sekedar diukur dari pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan juga dari kinerja ekonomi di tingkat daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator utama untuk menilai aktivitas dan struktur perekonomian regional karena menunjukkan nilai tambah produk serta layanan yang dihasilkan suatu wilayah (Ngabiyanto *et al.*, 2024). Melalui analisis PDRB, pemerintah dapat mengevaluasi perkembangan ekonomi daerah, mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, serta menilai sejauh mana pembangunan ekonomi daerah telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Peningkatan PDRB bergantung pada interaksi multiplikatif antara investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Investasi berperan sebagai pendorong atau

penambah modal yang memperluas batas kemungkinan produksi (*production possibility frontier*), sementara tenaga kerja menjadi determinan utama yang menggerakkan kapasitas tersebut menjadi *output* riil. Analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia berfungsi sebagai variabel moderasi yang menentukan efisiensi pemanfaatan modal dan teknologi di daerah (Atabayeva *et al.*, 2024). Sementara itu, belanja modal melengkapi interaksi tersebut dengan menyediakan landasan infrastruktur publik yang memperlancar konektivitas dan mobilitas faktor produksi. Keberadaan belanja modal tidak hanya berfungsi sebagai injeksi langsung ke dalam PDRB, tetapi juga sebagai fasilitas penunjang yang meminimalkan hambatan struktural, sehingga skala ekonomi dari investasi dan tenaga kerja dapat tercapai secara optimal.

Tanpa penguatan indeks pembangunan manusia, akumulasi investasi dan kuantitas tenaga kerja yang besar akan terjebak pada produktivitas rendah akibat hambatan inovasi dan keterbatasan keterampilan adaptif, akselerasi produktivitas tersebut akan sulit terealisasi apabila tidak ditopang oleh belanja modal pemerintah daerah yang memadai sebagai penyedia infrastruktur dasar ekonomi. Keterpaduan keempat faktor ini menjadi prasyarat esensial untuk mentransformasi struktur ekonomi dari basis komoditas menuju ekonomi bernilai tambah tinggi. Smith (1828) dalam teori Klasiknya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada efisiensi pembagian kerja dan besarnya akumulasi modal yang diinvestasikan kembali ke dalam sistem produksi.

Hubungan antara investasi, tenaga kerja, dan *output* daerah dapat dijelaskan melalui teori pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan oleh Solow (1956), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi melalui pengumpulan

investasi, sumber daya manusia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Investasi meningkatkan stok modal, sementara tenaga kerja menentukan kapasitas produksi dalam menghasilkan *output*.

Selain itu, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1990) menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia dan inovasi merupakan faktor utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks ini, indeks pembangunan manusia merepresentasikan kualitas modal manusia yang mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat pengaruh investasi terhadap PDRB.

Pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dianalisis secara relatif antarwilayah dan antarwaktu untuk memahami pola dan stabilitas pertumbuhan. Salah satu ukuran awal yang bisa dimanfaatkan guna mengidentifikasi karakteristik perkembangan perekonomian wilayah adalah nilai rata-rata pertumbuhan PDRB. Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman awal mengenai posisi Provinsi Kalimantan Tengah dalam dinamika pertumbuhan ekonomi regional, analisis dapat diarahkan pada data rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan.

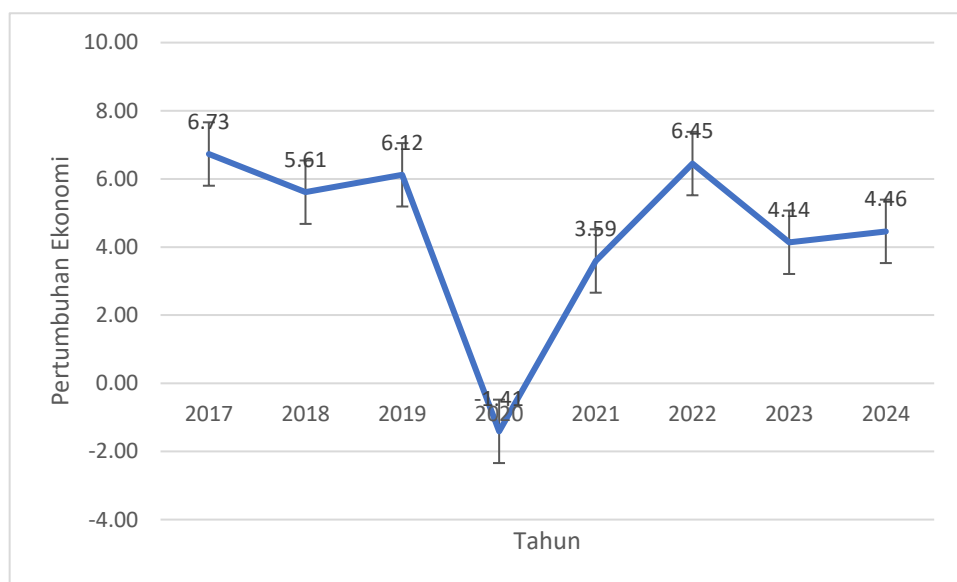
Tabel 1. 1 Rata-rata Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2010 Provinsi Kalimantan Tahun 2017-2024

No	Provinsi	Rata-rata laju Pertumbuhan PDRB
5	Kalimantan Tengah	4.46
4	Kalimantan Utara	4.41
2	Kalimantan Barat	4.09
3	Kalimantan Selatan	3.89
1	Kalimantan Timur	3.37

Sumber : BPS Indonesia, 2025 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2010 berdasarkan lapangan usaha di Provinsi Kalimantan menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46 persen, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain di

Kalimantan. Namun, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini bisa dipengaruhi oleh lonjakan signifikan pada periode tertentu, sementara di periode lainnya, ekonomi daerah mungkin mengalami penurunan atau kontraksi. Oleh karena itu, analisis terhadap pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak hanya mengandalkan angka rata-rata, melainkan juga perlu mencakup pengamatan terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kestabilan dan pola perkembangan ekonomi daerah.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025 (diolah)

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024

Berdasarkan Gambar 1.1 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-2024, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung naik-turun yang sangat drastis selama tahun ke tahun. Pada periode 2017-2019, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2018, meskipun kembali meningkat pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 perkembangan perekonomian menghadapi penurunan yang sangat parah, yang mencerminkan tekanan besar terhadap

aktivitas ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Diperlukan analisis mendalam terhadap variabel investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia dan belanja modal guna mengidentifikasi apakah pembentukan PDRB saat ini bersifat berkelanjutan atau hanya merupakan respons sesaat terhadap siklus harga komoditas global. Tanpa penguatan faktor-faktor fundamental ini, daerah akan terus terjebak dalam pola pertumbuhan yang fluktuatif dan berisiko mengalami stagnasi ekonomi di masa depan.

Ketersediaan investasi dan perluasan kesempatan kerja menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan PDRB dan kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berperan dalam memperluas kapasitas produksi serta membangun peluang kerja yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Martin, 2025). Provinsi Kalimantan Tengah adalah wilayah yang memiliki potensi besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya dengan kekayaan SDA yang tersedia.

Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah (2025) menunjukkan realisasi investasi di Kalimantan Tengah terus meningkat signifikan, mencapai Rp21,52 triliun pada 2024 dengan dominasi PMDN sebesar Rp3,48 triliun pada triwulan IV. Secara analitis, tren penguatan modal ini seharusnya berkorelasi linear dengan ekspansi PDRB melalui percepatan sektor-sektor strategis yang mengandalkan injeksi kapital. Namun, terdapat *research gap* yang nyata ketika pertumbuhan investasi yang masif belum sepenuhnya mampu menjamin stabilitas ekonomi

daerah, sebagaimana terlihat dari fluktuasi laju pertumbuhan PDRB yang masih rentan terhadap perlambatan pasca-pandemi

Tenaga kerja merupakan determinan fundamental yang menentukan kapasitas *output* riil melalui mekanisme produktivitas marginal. Penduduk bekerja di Kalimantan Tengah mencapai jumlah signifikan dengan tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK) yang relatif tinggi, namun secara struktural masih terjebak pada sektor pertanian yang menyerap lebih dari 50% total penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024). Ironisnya, konsentrasi tenaga kerja yang masif ini tidak berbanding lurus dengan ekspansi PDRB, terbukti dari laju pertumbuhan sektor pertanian yang lambat pada kisaran 1,48% di tahun 2024 (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025). Kenehan ini menciptakan *research gap* terkait asumsi pertumbuhan neoklasik, tingginya penyerapan tenaga kerja terbukti tidak mendorong *output* secara optimal akibat rendahnya nilai tambah dan stagnasi produktivitas di sektor primer tersebut.

Mandeknya produktivitas tenaga kerja pada sektor mayoritas tersebut secara teoretis menuntut adanya intervensi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM Kalimantan Tengah konsisten meningkat dari 69,79 pada 2017 menjadi 74,28 pada 2024, capaian ini memunculkan anomali struktural pada kinerja sektor riil (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024). Peningkatan kualitas SDM tersebut ironisnya tidak linier dengan produktivitas sektor pertanian penyerap tenaga kerja terbesar yang pertumbuhannya cenderung lambat (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025).

Paradoks ini mengindikasikan bahwa akumulasi modal manusia belum sepenuhnya terserap adaptif ke dalam sektor bernilai tambah. Kondisi tersebut

mempertegas *research gap* terkait inkonsistensi transmisi IPM terhadap *output* ekonomi daerah. Selain faktor investasi dan kualitas sumber daya manusia, pengeluaran pemerintah melalui instrumen Belanja Modal memiliki peran krusial dalam menstimulasi roda perekonomian suatu daerah. Secara teoritis, alokasi Belanja Modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang secara langsung mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dinamika penyerapan anggaran yang menjadi tantangan tersendiri di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada penghujung tahun 2025, serapan pada pos Belanja Modal tercatat belum optimal, yakni baru terealisasi sekitar 49,77% dari total pagu yang ditetapkan. Kondisi serapan anggaran fisik yang lambat ini berpotensi mengurangi daya dorong pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang juga terlihat dari tren pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang cenderung berfluktuasi bahkan sempat melambat di angka 4,43% pada kuartal IV tahun 2024 dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Inkonsistensi tersebut sejalan dengan perdebatan empiris mengenai determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih menunjukkan temuan bervariasi. Sebagai contoh penelitian sebelumnya, Sitorus *et al.* (2026) menemukan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB. Namun, R. Safitri & Suseno (2025) membuktikan bahwa hanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tenaga kerja yang

berdampak signifikan, sementara investasi asing dan pengeluaran pemerintah tidak.

Lebih lanjut, penelitian oleh Sitorus & Suhariato (2025) menunjukkan bahwa investasi dan pengangguran berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun hubungan tersebut tidak selalu konsisten, di mana peningkatan investasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan PDRB secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa dampak investasi terhadap kinerja ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural dan dinamika ekonomi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, mengingat urgensi strategis Kalimantan Tengah sebagai kawasan penyangga IKN yang menuntut kesiapan SDM kompetitif, sejalan dengan teori pusat pinggiran (Friedmann, 1966), di mana daerah sekitar berfungsi sebagai hinterland untuk menyuplai sumber daya dan tenaga kerja, maka pengujian komprehensif terhadap variabel investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal menjadi sangat krusial untuk membuktikan apakah perbaikan SDM benar-benar memicu transformasi struktural yang inklusif.

Kalimantan Tengah dengan basis ekonomi yang masih sangat bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, dihadapkan pada tantangan struktural berupa ketimpangan pertumbuhan antarwilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia dan belanja modal belum secara merata bertransmisi menjadi *output* ekonomi (PDRB) di seluruh kabupaten dan kota. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap keanehan ini menjadi esensial sebagai landasan perumusan kebijakan yang presisi. Hasil kajian ini diproyeksikan mampu mengarahkan alokasi investasi yang lebih inklusif dan mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja terdidik, guna akselerasi pencapaian target RPJMD dan RPJPN 2025-2029.

Di balik capaian Kalimantan Tengah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional Kalimantan, muncul urgensi analitis untuk mempertanyakan kualitas dan inklusivitas dari pertumbuhan itu sendiri. Masih terdapat bias struktural mengenai apakah ekspansi ekonomi tersebut benar-benar digerakkan oleh peningkatan kualitas modal manusia dan perluasan kesempatan kerja, atau sekadar merupakan produk dari dominasi sektor ekstraktif berbasis sumber daya alam yang cenderung padat modal. Merespons risiko terjadinya pertumbuhan yang bias (*growth without development*) pada sektor riil masyarakat, dekomposisi terhadap struktur pembentuk PDRB menjadi esensial.

Pengujian empiris untuk mengukur kontribusi masing-masing variabel investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia dan belanja modal terhadap PDRB kabupaten dan kota mutlak diperlukan untuk memastikan apakah tingginya pertumbuhan ekonomi murni mencerminkan transformasi yang berkualitas atau sekadar akumulasi kapital di sektor tertentu. Pencapaian angka pertumbuhan yang tinggi ini menyimpan beberapa anomali struktural yang mendasari munculnya gap penelitian (*research gap*).

Pertama, terdapat ketidakkonsistenan antara realisasi investasi yang masif dengan stabilitas *output* ekonomi. Meskipun investasi di Kalimantan Tengah terus meningkat signifikan hingga mencapai Rp21,52 triliun pada 2024, laju pertumbuhan PDRB justru menunjukkan fluktuasi yang sangat drastis dan rentan terhadap guncangan eksternal. Kedua, terjadi *mismatch* pada sektor ketenagakerjaan di mana sektor pertanian menyerap lebih dari 50% tenaga kerja, namun laju pertumbuhannya sangat lambat, yakni hanya sekitar 1,48%. Ketiga, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat secara konsisten, transmisi kualitas SDM tersebut belum mampu mendorong produktivitas sektor riil

secara optimal, mengindikasikan adanya akumulasi modal manusia yang belum terserap secara adaptif ke sektor bernilai tambah tinggi. Keempat, terdapat kesenjangan antara fungsi ideal Belanja Modal sebagai stimulus perekonomian daerah dengan realita penyerapannya di lapangan yang cenderung lambat dan belum optimal.

Kondisi tersebut menciptakan urgensi penelitian yang sangat mendesak. Sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Tengah dituntut untuk segera mentransformasi struktur ekonominya dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju ekonomi berbasis kapasitas SDM yang kompetitif. Tanpa analisis empiris yang presisi mengenai pengaruh investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia dan belanja modal, kebijakan pembangunan daerah berisiko salah sasaran dan gagal memperkecil ketimpangan antarwilayah. Selain itu, periode observasi 2017-2024 sangat penting untuk menguji resiliensi ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19.

Sebagai pembeda dari studi sebelumnya, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada unit analisis yang lebih granular, yakni mencakup seluruh 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode tahun 2017-2024, menggunakan metode regresi data panel. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas berfokus pada agregat tingkat provinsi, penelitian ini secara khusus membedah dinamika spasial di wilayah penyangga IKN. Hal ini bertujuan untuk menguji secara kritis apakah pertumbuhan ekonomi di daerah padat sumber daya alam ini benar-benar digerakkan oleh peningkatan kualitas modal manusia, atau sekadar produk dari akumulasi kapital di sektor tertentu (*growth without development*).

Permasalahan utama dalam penelitian ini berpusat pada belum konsistennya efektivitas investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, dan Belanja Modal dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. Terdapat indikasi paradoks ekonomi di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan tenaga kerja, serta peningkatan capaian indeks pembangunan manusia antarwilayah belum diikuti oleh pemerataan distribusi investasi. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh belum optimal dan lambatnya realisasi belanja modal pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal pendorong ekonomi. Mengingat penelitian sebelumnya cenderung dilakukan pada wilayah dan periode yang berbeda dengan hasil yang bervariasi, maka hubungan komprehensif antarvariabel tersebut dalam konteks Kalimantan Tengah periode 2017-2024 perlu dibuktikan secara empiris guna memetakan arah kebijakan pembangunan yang tepat.

Penelitian ini penting karena tanpa pemahaman yang jelas mengenai determinan utama PDRB, kebijakan pembangunan daerah berisiko belum sesuai target untuk memperkecil dan memperkuat stabilitas pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis empiris terhadap pengaruh investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia dan belanja modal menjadi urgensi untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024?

2. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024?
5. Bagaimana pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal secara simultan terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017-2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal secara simultan terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur dalam kajian ekonomi pembangunan regional, khususnya mengenai determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat kabupaten dan kota melalui pendekatan regresi data panel. Selain itu, kajian ini dapat menjadi landasan empiris untuk melihat relevansi teori pertumbuhan neoklasik dan endogen, terutama pada karakteristik perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2. Sebagai bahan evaluasi distribusi investasi dan kualitas pembangunan manusia antarwilayah.
3. Sebagai referensi bagi akademisi dalam pengembangan penelitian ekonomi pembangunan daerah.

1.5 Batasan Masalah

Analisis dalam kajian ini terbatas pada perekonomian tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus pada pengaruh investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 2017-2024. Periode ini dipilih karena mencakup rentang waktu 8 tahun terakhir yang merepresentasikan tren pertumbuhan makroekonomi daerah dan mencerminkan dinamika pembangunan ekonomi jangka menengah secara memadai. Data sekunder berupa data panel

tahunan digunakan, bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta DJPK Kementerian Keuangan.

Analisis hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan metode Regresi Data Panel untuk menjawab seluruh rumusan masalah terkait pengaruh variabel independen terhadap PDRB. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan dibatasi hanya pada variabel makroekonomi yang telah ditetapkan, serta tidak membahas faktor-faktor eksternal, kebijakan politik, maupun aspek non-ekonomi lainnya di luar model, sehingga fokus pada arah hubungan dan besaran pengaruh *determinan* tersebut terhadap pembentukan PDRB daerah.